



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta -Puncak Indah- Malili

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Malili, 31 Agustus 2021



KEPALA DINAS,

Drs. SUKARTI

Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 19650210193031015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii

BAB. I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA POKOK DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan kedua..
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB. III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB. V : PENUTUP

Daftar Tabel

Tabel 1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Triwulan kedua

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

Tabel 3. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Renja Dinsos P3A Tahun 2021

Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial P3a Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022

Tabel 7. Alokasi anggaran Dinas Sosial P3a Kabupaten Luwu timur Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisikan rencana Program Kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 - 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merujuk pada tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan untuk dicapai melalui penetapan program-program dan kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang.

Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan.

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan RENJA PERUBAHAN ,Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sulawesi selatan Momor 243);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 103);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) PERUBAHAN merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun. Maksud penyusunan RENJA PERUBAHAN adalah sebagai dasar dan acuan dalam menyusun rencana kerja penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kesejahteraan sosial agar setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat menerangkan perencanaan kerja yang akan dilakukan pada tahun 2021,

dan sejalan dengan upaya mewujudkan good governance yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 -2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ,Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Mendukung RPJP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 - 2025;
2. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur;
3. Dasar untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Luwu Timur.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA POKOK DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sampai Dengan Triwulan Kedua

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for*

Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
2. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

3. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Untuk mencapai kinerja yang lebih baik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur berupaya dan berusaha memperbaiki kekurangan/kelemahan. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan / kegagalan tersebut sebagai umpan balik/Flash back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan II tahun 2021 Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2021

TRIWULAN II

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV							
			7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	3.221.811.855		320.262.697		1.257.823.709						1.698.675.451			
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu	100%	83.524.835		13.399.100		20.710.564					1	34.109.664		40,84%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2	34.593.226	-	4.691.100	1	12.295.000					1	16.986.100	50,00%	49,10%	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	5.669.036	-	-	1	2.217.036					1	2.217.036	50,00%	39,11%	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2	2.403.204	-	-	1	-					0	-	16,67%	0,00%	

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10	40.859.369	4	8.708.000	2	6.198.528					6	14.906.528	60,00%	36,48%
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminsitrase keuangan peranglat daerah	100%	2.407.156.770	-	304.163.597		946.671.163					-	1.250.834.760	0,00%	51,96%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	22	2.340.556.770	22	304.163.597	21	918.921.163					21	1.223.084.760	95,45%	52,26%
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	16	66.600.000	3	-	4	27.750.000					7	27.750.000	43,75%	41,67%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	28.230.000	0			12.450.000					0	12.450.000	20,00%	44,10%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	5	28.230.000	-	-	3	12.450.000					3	12.450.000	60,00%	44,10%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	402.132.400		73.707.100		158.068.550						224.727.250		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	Jumlah komponen instalasai listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7	3.304.800	-	-	4	2.000.000					4	2.000.000	57,14%	60,52%

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1	29.576.400	1	7.048.400	1	14.998.400					1	14.998.400	66,67%	50,71%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	13.850.000	-	-	5	13.844.000					5	13.844.000	100,00%	99,96%
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60	6.480.000	8	820.000	20	1.940.000					28	2.760.000	46,67%	42,59%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makan dan minum tamu dan pegawai	110	4.950.000	38	1.980.000	50	1.980.000					88	3.960.000	80,00%	80,00%
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	405	343.971.200	85	63.858.700	157	123.306.150					242	187.164.850	59,75%	54,41%
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	0%	0	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	-	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	0	0	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%

DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	123.210.000		10.381.905		28.227.472					-	38.609.377	0,00%	31,34%
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasikan (nomor)	1200	1.650.000	249	-	298	825.000					547	825.000	45,58%	50,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	84	70.560.000	8	10.381.905	10	8.652.472					18	19.034.377	21,43%	26,98%
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	36	51.000.000	-	-	15	18.750.000					15	18.750.000	41,67%	36,76%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	177.557.850		46.248.440		91.695.960					-	137.944.400	0,00%	77,69%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11	121.200.000	4	40.548.440	4	48.654.960					8	89.203.400	72,73%	73,60%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis)	37	23.100.000	6	2.700.000	14	12.800.000					20	15.500.000	54,05%	67,10%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1	33.257.850	1	3.000.000	1	30.241.000					1	33.241.000	100,00%	99,95%
				3.221.811.855	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										85,15%	41,43%
					Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah
																0,00%

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

						-							-	-		
				-												
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang diberikan Bantuan Sosial	100	3.454.652.186		49.478.056		1.497.493.908						1.546.971.964		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial daerah yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	27	3.454.652.186	-	49.478.056	26	1.497.493.908					26	1.546.971.964	96,30%	44,78%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	27	3.454.652.186	-	49.478.056	26	1.497.493.908				-	26	1.546.971.964	96,30%	44,78%
				3.454.652.186	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										96,30%	44,78%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang ditangani	100	1.120.800.458		25.270.000		360.314.353						417.091.199		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (orang)	20	45.240.000	-			15.884.150					1	15.884.150	5,00%	35,11%

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, pengemis gelandangan, penyandang penyakit sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum yang diberikan bimbingan (orang)	10	45.240.000	-	-	1	15.884.150					1	15.884.150	10,00%	35,11%
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (jenis)	3	1.075.560.458		44.746.846		344.430.203					3	401.207.049		
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan PMKS yang ditangani (orang)	25	116.759.720	7	25.270.000	9	47.500.270					16	72.770.270	64,00%	62,32%
	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang memperoleh permakanan	12242	908.839.894	#####	19.476.846	#####	286.083.650					10.790	305.560.496	88,14%	33,62%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan fisik mental dan spritual (orang)	10	49.960.844	-	12.030.000	10	10.846.283					10	22.876.283	100,00 %	45,79%
				1.120.800.458	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										83,00%	35,80%
					Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang diberikan bansos kebutuhan dasar	100%	574.236.475		59.082.850		109.154.800						168.237.650		

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola (dokumen)	1	574.236.475	-	59.082.850		109.154.800					1	168.237.650	100,00 %	29,30%
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang miskin yang didata	31997	340.399.625	#####	23.820.000	#####	52.610.900					31.997	76.430.900	100,00 %	22,45%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	7500	233.836.850	7.253	35.262.850	9.403	56.543.900					8.328	91.806.750	111,04 %	39,26%
				574.236.475	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										45,22%	15,99%
					Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Korban Bencana yang ditangani	100	212.388.340		44.380.000		63.406.000						107.786.000		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang ditangani (jiwa)	150	212.388.340	42	44.380.000	3	63.406.000					45	107.786.000	30,00%	50,75%
	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan makanan (KK)	150	212.388.340	42	44.380.000	3	63.406.000					45	107.786.000	30,00%	50,75%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina (orang)	70	0	-	-		-					-	-	0,00%	#DIV/0!
				212.388.340	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										30,00%	0,00%
					Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	65.910.000		-		15.000.000						15.000.000		

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3	65.910.000	-	-		15.000.000						15.000.000		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3	65.910.000	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	0,00%	22,76%
				65.910.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	22,76%
					Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga PEMERINTAH		192.911.874		13.124.347		68.529.000						56.503.347		
		Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta		192.911.874				68.529.000								
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	39	84.159.745	39	13.124.347	39	26.539.000					39	39.663.347	100,00 %	47,13%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	39	84.159.745	39	13.124.347	39	26.539.000	-	-	-		39	39.663.347	100,00 %	47,13%
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang diberdayakan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi (orang)	32	108.752.129	-	-		41.990.000						16.840.000		

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	32	29.653.969	-	-	-	4.020.000	-	-	-	-	4.020.000	0,00%	13,56%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	39	79.098.160	-	-	39	12.820.000	-	-	-	39	12.820.000	100,00 %	16,21%
				301.664.003	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									54,12%	18,73%
					Predikat Kinerja									Rendah	Sangat Rendah
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO		461.616.219	-			160.990.151					277.621.370		
	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah kabupaten/kota	Jumlah pesertayang mengikuti rapat kordinasi dan sosialiasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	60	52.530.000	-	-	-	10.397.651					10.397.651		
	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang mengikuti rapat kordinasi dan sosialiasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	60	52.530.000	-	-	-	10.397.651	-	-	-	-	10.397.651	0,00%	19,79%
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (kasus)	40	409.086.219	11	116.631.219		150.592.500					267.223.719		

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang)	40	409.086.219	8	116.631.219	2	150.592.500	-	-	-		10	267.223.719	25,00%	65,32%
				461.616.219	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										22,16%	60,14%
					Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase peningkatan kualitas keluarga		49.887.249		11.757.249		16.520.000						28.277.249		
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga (orang)	100	49.887.249	-	11.757.249		16.520.000						28.277.249	0,00%	56,68%
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga (orang)	100	49.887.249	-	11.757.249	-	16.520.000	-	-	-		-	28.277.249	0,00%	56,68%
				49.887.249	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	56,68%
					Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase profil gender dan anak yang tersusun	100%	19.086.909	-			-						-		

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1	19.086.909	-	-		-						-	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah profil gender dan anak yang disusun (dokumen)	1	19.086.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
				19.086.909	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0,00%	148,15%
					Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Tinggi
11	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase Hak Anak yang terpenuhi	100%	111.856.666		9.825.598		24.780.000					34.605.598		
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	26.651.068	1	4.020.000		-					4.020.000	0,00%	15,08%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	26.651.068	-	4.020.000	-	-	-	-	-	-	4.020.000	0,00%	15,08%

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1	85.205.598	-	5.805.598	1	24.780.000						30.585.598		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1	85.205.598	-	5.805.598	1	24.780.000	-	-	-		1	30.585.598	100,00 %	35,90%
				111.856.666	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										76,17%	30,94%
					Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah
			9.485.158.231		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										80,91%	45,87%
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Tinggi	Sangat Rendah

Dari table diatas hasil evaluasi Triwulan II terhadap renja tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja program Renja Triwulan II mencapai 80,91 dengan kategori Tinggi dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.350.769.828 atau 45,87 persen.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap Kesejahteraan sosial.

Dalam hal penyelenggaraan tugas pokok, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melaksanakan penyusunan dan kebijakan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Luwu Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur terlihat masih banyak permasalahan yang perlu diidentifikasi, yaitu:

2.2.1 Bidang Sosial

Untuk meningkatkan dan menangani secara cepat dan tepat pelayanan bantuan pertolongan dan penanggulangan bencana serta masalah sosial yang ada merupakan salah satu upaya strategis bidang sosial bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang tertimpah bencana serta melakukan rehabilitasi bangunan Panti Asuhan yang sudah tidak layak ditempati, maka perlu :

1. Meningkatnya program peningkatan sarana dan prasarana aparat
2. Meningkatnya program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatnya sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana

2.2.2 Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Dalam meningkatkan dan menangani permasalahan Perempuan dan Anak untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan, maka perlu :

- a. Peningkatan Jumlah kelompok organisasi perempuan yang dilatih tentang pengarusutamaan gender (penyusunan data terpilah untuk profil gender);
- b. Peningkatan Jumlah kelompok organisasi perempuan yang memahami data terpilah untuk penyusunan profil gender;
- c. Peningkatan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
- d. Peningkatan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di Rumah Sakit;
- e. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- f. Peningkatan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;

- g. Peningkatan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. Peningkatan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- i. Peningkatan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- j. Peningkatan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2016-2021. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

**TABEL 02 (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. LUWU TIMUR**

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Anlisis
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks penanganan permasalahan social	0.27	0.28	0.29	0.29	0,25	0.27	0.29	0.29	
2	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak (%)	15.05	32.94	43.2	50.93	15	36.9	51	50.93	
3	Nilai SAKIP	55	60	70	70	46.8	77.46	78,69	70	

Jika dilihat Tabel 2 (**Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017**) di atas, hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur menunjukkan keberhasilan pencapaian yang dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat, peningkatan capaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program-program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi Indeks Penanganan Permasalahan Sosial dengan cara mengukur berapa persen jumlah PMKS yang ditangani dan berapa persen PMKS yang telah diberdayakan di Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2020 target Indeks penanganan permasalahan sosial adalah 0.29. Realisasi capaian di tahun 2020 adalah sebesar 0.22. Hal ini bukan berarti penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Luwu Timur telah tidak mencapai target. Sebab dengan bertambahnya jumlah orang miskin sebagai akibat DAMPAK DARI Covid 19 menyebabkan jumlah PMKS melonjak secara signifikan sehingga perhitungan persen angka pembagiannya lebih tinggi yang menyebabkan indeks tidak mencapai 0,29. Angka tersebut diperoleh dari $((\text{Jumlah PMKS yang ditangani } 12.937 / \text{Jumlah PMKS yang ada } 347.590) \times 80\%) + (\text{Jumlah PMKS yang memperoleh pemberdayaan sosial } 290 / \text{Jumlah PMKS seharusnya } 42.511) \times 20\%)$.

Indikator kinerja Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak (%) yang diperoleh dari rumus $(\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif } 33 / \text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak } 33) + (\text{Jumlah SKPD yang telah melaksanakan PPRG dan ARG } 39 / \text{Jumlah seluruh SKPD}) \times 100\%$, realisasi pada tahun 2020 sebesar 51 % mencapai target dari target 50,93 %

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Adanya kebutuhan atas penanganan masyarakat miskin dan penyandang kesejahteraan masalah social masih tergantung dari bantuan. Dalam menangani urusan social terutama pada penyandang masalah kesejahteraan sosial terkadang tidak sesuai dengan perencanaan atas kebutuhan pemberian bantuan dan pemberdayaan, hal ini juga dipengaruhi oleh harapan hidup seseorang dan kematian.

Namun permasalahan itu dapat diatasi dengan adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai sektor. Adanya pendataan berbasis system informasi teknologi yang lebih akurat dan mempercepat proses pemberian bantuan, pemberdayaan PMKS, serta banyaknya rekan kerja hingga ke wilayah terkecil pedesaan dengan dibantu para kader.

Isu yang terpenting saat ini adalah adanya wabah pandemik corona virus deaseas tahun 2019 atau covid 19 yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin. Hal ini berdampak langsung kepada masyarakat miskin, sehingga peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dalam penanganan wabah Covid 19 dengan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak berupa bantuan sembako bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG).

- b. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak

Anak adalah calon pemimpin bangsa sedangkan perempuan adalah guru pertama bagi calon generasi bangsa. Namun kekerasan pada perempuan dan anak masih banyak terjadi, hal ini dikarenakan

masih kurangnya pemahaman hukum dalam kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat. Oleh karenanya Dinas Sosial P3a Kabupaten Luwu Timur melaksanakan sosialisasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan serta pendampingan lingkungan korban kekerasan karena kekerasan terjadi bukan hanya disebabkan dari faktor pelaku, namun kondisi dari lingkungan pelaku maupun korban. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan dan mewujudkan Luwu Timur Kabupaten Layak Anak serta mengupayakan pembentukan UPTD Penanganan Korban Kekerasan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2021. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut: Guna pencapaian program prioritas Pembangunan sektor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu

**TABEL 03 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase rata-rata capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100%	3.388.326.955	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase rata-rata capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100%	3.479.758.944	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu	100%	86.709.635	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu	100%	98.882.285	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	34.593.226	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	43.932.566	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	8.702.036	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	6.327.146	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2.555.004	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2.403.204	

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	40.859.369	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	46.219.369	
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminsitasi keuangan peranglat daerah	100%	2.407.156.770	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminsitasi keuangan peranglat daerah	100%	2.509.234.432	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	22 org	2.340.556.770	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	22 org	2.430.507.932	
	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		66.600.000	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		78.726.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	67.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	37.690.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	5 orang	67.800.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	5 orang	37.690.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	451.612.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	482.843.800	

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	3.304.800	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	5.875.200	
	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	29.576.400	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	33.076.600	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 jenis	13.850.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 jenis	16.850.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	6.480.000	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	6.480.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	110 ORANG	4.950.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	110 ORANG	4.950.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	405 kali	393.451.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	405 kali	415.612.000	
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	74.280.300	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	0	
	Pengadaan mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	3 jenis%	16.236.200	Pengadaan mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	3 jenis%	-	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 Jenis%	41.344.100,00	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	MALILI	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 Jenis%	-	

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Jenis%	16.700.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Jenis%	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	123.210.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	86.710.000	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	SKPD	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang digendakan	1250 nomor	1.650.000,00	Penyediaan Jasa Surat menyurat		Jumlah surat keluar dan surat masuk yang digendakan	1250 nomor	1.650.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	84 rekening	70.560.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	84 rekening	43.060.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang	51.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang	42.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	SKPD	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	177.557.850	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	SKPD	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	264.398.427	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11 unit	121.200.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11 unit	168.400.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis)	37 unit	23.100.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kabupaten	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis)	37 unit	31.100.000	

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	SKPD	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	33.257.850,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	64.898.427	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	3.454.652.186	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	3.813.640.022	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial daerah yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	27 kelompok	3.454.652.186	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial daerah yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	27 kelompok	3.813.640.022	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	27 kelompok	3.454.652.186,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	27 kelompok	3.813.640.022	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase PMKS yang tertangani	100	1.383.359.678	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase PMKS yang tertangani	100	1.164.780.458	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah penyandang fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	20 orang	62.890.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah penyandang fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	20 orang	45.240.000	

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, pengemis gelandangan, penyandang penyakit sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum yang diberikan bimbingan sosial (orang)	20 orang	62.890.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, pengemis gelandangan, penyandang penyakit sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum yang diberikan bimbingan sosial (orang)	20 orang	45.240.000,00	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (jenis)	3 jenis	1.320.469.678	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (jenis)	3 jenis	1.102.660.458	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah layanan pengaduan PMKS yang ditangani (orang)	100 persen	146.709.720	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah layanan pengaduan PMKS yang ditangani (orang)	100 persen	160.739.720	
	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah PMKS yang memperoleh permakanan (Rastra/BPNT) / (KPM)	10939 KPM	949.019.894	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah PMKS yang memperoleh permakanan (Rastra/BPNT) / (KPM)	10939 KPM	908.839.894	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan fisik mental dan spritual (orang)	186 orang	224.740.064	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan fisik mental dan spritual (orang)	186 orang	49.960.844	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	666.546.475	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	622.433.780	

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah data fakir miskin yang dikelola (dokumen)	1 dokumen	666.546.475	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah data fakir miskin yang dikelola (dokumen)	1 dokumen	622.433.780	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	8000 kpm	349.299.625	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	8000 kpm	353.802.600	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	1 dokumen	317.246.850	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	1 dokumen	268.631.180	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	100	285.438.340	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	100	291.548.340	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	150 jiwa	232.398.340	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	150 jiwa	291.548.340	
	Penyediaan Makanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	150 jiwa	232.398.340	Penyediaan Makanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	150 jiwa	291.548.340	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah tagana yang dibina (orang)	70 orang	53.040.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah tagana yang dibina (orang)	70 orang	0	

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina (orang)	70 orang	53.040.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina (orang)	70 orang	-	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	65.910.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	65.910.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kec. Malili, Wotu, Mangkuta na	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	65.910.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kec. Malili, Wotu, Mangkutan a	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	65.910.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kec. Malili, Wotu, Mangkuta na	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	65.910.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kec. Malili, Wotu, Mangkutan a	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	65.910.000	
7	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	76,02	264.066.952	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	76,02	210112.039	
		Kabupaten Luwu Timur	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23,98			Kabupaten Luwu Timur	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23,98		
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi	6	92.469.745	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi	6	84.157.380	

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	39 opd	92.469.745	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	39 opd	84.157.380	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan	2	171.597.207	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan	2	125.954.659	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	64 orang	29.653.969	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	64 orang	29.653.969	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	39 klpok	141.943.238	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	39 klpok	96.300.690	
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten Luwu Timur	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	72,73	483.226.219	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten Luwu Timur	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	72,73	653.202.596	

	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan (orang)	60 orang	52.530.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan (orang)	60 orang	53.162.349	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	52.530.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	53.162.349	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (kasus)	40 orang	430.696.219	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (kasus)	40 orang	600.040.247	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang)	40 orang	430.696.219	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang)	40 orang	600.040.247	
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kabupaten Luwu Timur	Ratio layanan pembelajaran keluarga		58.357.249	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kabupaten Luwu Timur	Ratio layanan pembelajaran keluarga		61.947.249	

	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	58.357.249	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	61947.249	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	58.357.249	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	61.947.249	
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase OPD yang menyediakan data gender		30.046.909	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase OPD yang menyediakan data gender		21.486.909	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1 dokumen	30.046.909	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1 dokumen	21.486.909	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1 dokumen	30.046.909	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1 dokumen	21.486.909	
11	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi	100%	158.156.666	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Luwu Timur	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi	100%	150.337.894	

	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	33.651.068	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	43846.068	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	33.651.068	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	43.846.068	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1	124.505.598	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1	106.491.826	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1 lembaga	124.505.598	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1 lembaga	106.491.826	
					10.238.087.629					10.535.158.231	

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.1.1. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur mempunyai tujuan yakni *Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

3.1.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kegiatan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah : 1). Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2). Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan / anak; 3). Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah;

3.2. Program dan Kegiatan

Program kegiatan adalah kumpulan dari beberapa kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terpadu yang apabila dilaksanakan dengan baik sesuai dengan urutan/sistematikanya akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dapat di lihat pada Form II sebagaimana terlampir.

Tabel 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Pada Perubahan Renja Tahun 2021

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		
					Pokok	Refocusing	Peubahan Anggaran
		(2)		(5)	(6)	(7)	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.244.233.634	8.649.799.314	9.474.136.709
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			9.244.233.634	8.649.799.314	9.474.136.709
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100%	3.388.326.955	3.221.811.855	3.599.145.509
	2	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu	100%	86.709.635	83.524.835	92.194.835
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	34.593.226	34.593.226	43.263.226
		2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	8.702.036	5.669.036	5.669.036
		3 Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2.555.004	2.403.204	2.403.204

	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	40.859.369	40.859.369	40.859.369
2		Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminisitrasi keuangan peranglat daerah	100%	2.407.156.770	2.407.156.770	2.738.425.324
	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	22 org	2.340.556.770	2.340.556.770	2.671.825.324
	6	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		66.600.000	66.600.000	66.600.000
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	67.800.000	28.230.000	28.230.000
	7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	5 orang	67.800.000	28.230.000	28.230.000
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	451.612.400	402.132.400	436.527.500
	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	Jumlah komponen instalasai listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	3.304.800	3.304.800	3.304.800
	9	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	29.576.400	29.576.400	32.582.300
	10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 jenis	13.850.000	13.850.000	16.850.000
	11	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	6.480.000	6.480.000	6.480.000
	12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	110 ORANG	4.950.000	4.950.000	4.950.000

	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	405 kali	393.451.200	343.971.200	372.360.400
5		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	74.280.300	0	0
	14	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 jenis%	16.236.200	-	-
		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 Jenis%	41.344.100,00	-	-
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Jenis%	16.700.000,00	-	-
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	123.210.000	123.210.000	114.210.000
	15	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang digendakan	1250 nomor	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	84 rekening	70.560.000,00	70.560.000,00	70.560.000,00
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang	51.000.000,00	51.000.000,00	42.000.000,00
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	177.557.850	177.557.850	189.557.850
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11 unit	121.200.000,00	121.200.000,00	133.200.000,00
	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis)	37 unit	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00

		20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	33.257.850,00	33.257.850,00	33.257.850,00
2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	3.454.652.186	3.454.652.186	3.811.710.022
	8		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial daerah yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	27 kelompok	3.454.652.186	3.454.652.186	3.811.710.022
		21	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	27 kelompok	3.454.652.186,00	3.454.652.186,00	3.811.710.022,00
3			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang tertangani	100	1.383.359.678	1.120.800.458	1.147.900.458
	9		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	20 orang	62.890.000	45.240.000	45.240.000
		23	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, pengemis gelandangan, penyandang penyakit sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum yang diberikan bimbingan (orang)	20 orang	62.890.000,00	45.240.000,00	45.240.000,00

10		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (jenis)	3 jenis	1.320.469.678	1.075.560.458	1.102.660.458
	24	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan pengaduan PMKS yang ditangani (orang)	100 persen	146.709.720	116.759.720	143.859.720
	25	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang memperoleh permakanan (Rastra/BPNT) / (KPM)	10939 KPM	949.019.894	908.839.894	908.839.894
	26	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan fisik mental dan spritual (orang)	186 orang	224.740.064	49.960.844	49.960.844
4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	666.546.475	574.236.475	591.832.380
11		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola (dokumen)	1 dokumen	666.546.475	574.236.475	591.832.380
	27	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	8000 kpm	349.299.625	340.399.625	348.809.625
	28	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	1 dokumen	317.246.850	233.836.850	243.022.755
5		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	100	285.438.340	212.388.340	257.638.340
12		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	150 jiwa	232.398.340	212.388.340	257.638.340

		29	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	150 jiwa	232.398.340	212.388.340	257.638.340
	13		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tagana yang dibina (orang)	70 orang	53.040.000	0	0
		30	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina (orang)	70 orang	53.040.000	-	-
6			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	65.910.000	65.910.000	65.910.000
	14		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	65.910.000	65.910.000	65.910.000
		31	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	65.910.000	65.910.000	65.910.000
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			993.853.995	835.358.917	1.061.021.522
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			993.853.995	835.358.917	1.061.021.522
7			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	76,02	264.066.952	192.911.874	200.411.874
				Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23,98			

15		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi	6	92.469.745	84.159.745	84.159.745
	32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	39 opd	92.469.745	84.159.745	84.159.745
16		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan	2	171.597.207	108.752.129	116.252.129
	33	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	64 orang	29.653.969	29.653.969	29.653.969
	34	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	39 klpok	141.943.238	79.098.160	86.598.160
8		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	72,73	483.226.219	461.616.219	653.202.596
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan (orang)	60 orang	52.530.000	52.530.000	53.162.349

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	52.530.000	52.530.000	53.162.349
17		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (kasus)	40 orang	430.696.219	409.086.219	600.040.247
	35	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang)	40 orang	430.696.219	409.086.219	600.040.247
9		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Ratio layanan pembelajaran keluarga		58.357.249	49.887.249	55.687.249
18		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	58.357.249	49.887.249	55.687.249
	36	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	58.357.249	49.887.249	55.687.249
10		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase OPD yang menyediakan data gender		30.046.909	19.086.909	21.486.909
19		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1 dokumen	30.046.909	19.086.909	21.486.909

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

		37	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1 dokumen	30.046.909	19.086.909	21.486.909
11			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi	100%	158.156.666	111.856.666	130.232.894
	20		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	33.651.068	26.651.068	29.781.068
		38	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	33.651.068	26.651.068	29.781.068
	21		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1	124.505.598	85.205.598	100.451.826
		39	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1 lembaga	124.505.598	85.205.598	100.451.826
			TOTAL			10.238.087.629	9.485.158.231	10.535.158.231

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sebagai bahan acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya RENJA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur diharapkan agar seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan tak kalah pentingnya tetap berkoordinasi dengan SKPD/Instansi terkait dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Malili , 31 Agustus 2021

KEPALA DINAS,



Drs. SUKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196502101993031015

